

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdullah, Rozali, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azhary, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbitan Djambatan.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Sangadji, ZA, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Magetan: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

—————, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Situmorang, Victor, dan Soedibyo, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tjandra, W Riawan, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Permen Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemberian  
Hak Atas Tanah

**Internet :**

<http://belajarhukum27.blogspot.co.id/2014/12/pendaftaran-tanah-secara-sistematik.html>

<http://bukupertanahan.blogspot.co.id/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sporadik.html>

<http://lunakejora.blogspot.co.id/2012/02/contradictoire-delimitatie-dalam.html>

<http://jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah.html>

<http://marunggai's.blogspot.co.id/2009/04/fungsi-sertipikat-hak-milik-atas-tanah.html>

<http://deskaeffendi.blogspot.co.id/2011/12/pendaftaran-tanah.html>

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 003/G/2015/PTUN-Smg.